

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.

Algra, N.E., H.R.W Gokkel dkk, 1983, *Kamus istilah Hukum Fockema Andreae ,Belanda-Indonesia*,Binacipta, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Ketigabelas, Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Effendi, Lutfie, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing,Malang.

Handayaniingrat, Soewarno, 1980, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*, PT. Inti Idayu Press, Jakarta.

Indroharto,1996, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Koentjoro, Dian Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Lumban Tobing, G.H.S., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Nasution, S , 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan keenam, Bumi Aksara, Jakarta.

Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nawawi, Hadari, 1995, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur*, Erlangga, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia editor Anke Dwi Saputro, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Dimasa Depan*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Saydan, Gauzali, 2003, *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*, Djambatan, Jakarta.
- Shaleh, Ismail dan Supriadi, 2010, *Etik dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- S.P, Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujamto, 1987, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Toedjosaputro, Liliana, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Utrecht, E., 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

- Bakhtiar, Tri Meitasari, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Indramayu", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Margareth,Rona Ayu Edithya, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Rahayu,Hastari Endah, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Tugas Notaris di Kabupaten Cilacap”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Yuswan,Muhammad, “Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Konawe Selatan”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Keja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01.Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.



D. Internet

Anonim, “Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Temanggung”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Temanggung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonosobo,Kabupaten_Banjarnegara,dan_Kabupaten_Temanggung), diakses pada tanggal 5 September 2015.

Anonim, “Tentang KPH Kedu Utara”, <http://phbmkdu.blogspot.co.id/2009/11/phbm-kph-kedu-utara-adalah-salah-satu.html?m=1>, diakses pada tanggal 5 September 2015.

Iwan Budisantoso, “Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum Di Indonesia”, <http://www.kompasiana.com>, diakses 13 Maret 2016.